

## DAFTAR PUSTAKA

- Makhfathih, A., & Agus, C. (2010). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Metha Studio.
- Memah, E. W. (2013). Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD Kota Manado. *Jurnal EMBA Vol. 1 No.3 Juni 2013, Hal. 871-881*.
- P3ADK. (2007-2015). *Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah*. Kota Yogyakarta: Bagian Perekonomian, Pengembangan Pendaptan Asli Daerah, dan Kerjasama.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*. (2011). Kota Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan*. (2011). Kota Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu*. (2012). Kota Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha*. (2012). Kota Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum*. (2012). Kota Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan*. (2010). Kota Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016*. (2015). Kota Yogyakarta.
- Prameka, A. S. (2013). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang. *Jurnal FEB Universitas Brawijaya Malang*.
- Putri, A. C. (2014). Deskripsi Oportunistik Eksekutif dalam Pemungutan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012. *Artikel Ilmiah Mahasiswa 2014*.
- Riduansyah, M. (2003). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD dan APBD Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kota Bogor). *MAKARA, SOSIAL HUMANIORA, VOL. 7, NO. 2, DESEMBER 2003*.
- Suciadi, A. (2014). Tingkat Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang, Jawa Timur. *Jurnal FEB Universitas Brawijaya Malang*.
- Undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah*. (2014). Jakarta: Pemerintah RI.
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah*. (2009). Jakarta: Pemerintah RI.

*Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah  
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (2004). Jakarta:*

*Pemerintah RI.*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan  
Daerah. (2014).*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan  
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. (2004).*